



Terminal Beralih Fungsi Jadi Pasar

"Kalau memang itu pasar, kemana pemasukan pasar itu. Kami tidak pernah melihat pemasukan di PAD, itu masuk ke rekening APBD apa ke kantong pribadi?"

(Anggota DPRD Denpasar, Eko Supriadi)

DENPASAR, NusaBali

Sejumlah terminal di Kota Denpasar telah beralih fungsi menjadi pasar. Anehnya, meski telah berubah fungsi, namun retribusi dari pasar-pasar tersebut ternyata tidak jelas.

Hal ini pun menjadi sorotan jajaran anggota DPRD Denpasar. Seperti diungkapkan politisi PDIP, Eko Supriadi. Wakil rakyat yang juga Ketua Komisi III DPRD Denpasar ini menyebut, adanya perubahan terminal di Denpasar yang dijadikan lahan-lahan pasar membuat fungsi lahan tersebut simpang siur. Pihaknya juga menyoroti, meski telah berubah fungsi menjadi pasar dan para pedagang sudah dipungut retribusi, namun pasar-pasar tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Denpasar.

"Kita sendiri melihat angkutan kota dan terminal sudah mati suri. Banyak lahan terminal yang

tidak ada. Kawasan pungutan parkirnya juga harus jelas. Kalau tepi jalan masuk retribusi. Kalau di tengah pasar objek pajak," ujar Susrutha.

Sementara terpisah, Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Gede Astika mengatakan, terkait adanya perubahan sejumlah terminal menjadi pasar tersebut pihaknya sedang menelusuri kronologis bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi. "Kita sedang telusuri, kita cari tahu bagaimana kronologisnya dulu terminal bisa berubah jadi pasar," kata Astika, kemarin.

Diakui Astika, saat ini memang dari pasar-pasar yang meng-

itu terminal atau pasar? Kalau memang terminal mari kita jalankan fungsi terminal, kalau memang dialihkan ke pasar mari kita jalankan fungsi pasar, biar jelas retribusinya masuk kemana," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, AA Susrutha Ngurah Putra. Menurut politisi asal Puri Gerenceng ini, pemerintah tidak boleh mengubah fungsi terminal menjadi pasar seenaknya. Terlebih hingga kini pemasukan dari pasar-pasar tersebut juga tidak jelas. "Ini tidak ada retribusi sewa tempat, baik di Kreneng, di Wangaya juga

sudah menjadi pasar. Contohnya di Kreneng dan Wangaya. Kalau memang itu pasar, kemana pemasukan pasar itu. Kami tidak pernah melihat pemasukan di PAD, itu masuk ke rekening APBD apa ke kantong pribadi?," ujar Eko Supriadi, di Denpasar, Kamis (10/11).

Eko Supriadi mengatakan, berubahnya fungsi terminal menjadi salah satu pemicu semakin terpinggirkannya keberadaan angkutan kota di Denpasar. Keberadaan sopir-sopir angkutan kota semakin terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang di pasar tersebut. "Sekarang ini simpang siur. Di Kreneng dan Wangaya

gunakan lahan terminal tersebut belum memberikan kontribusi kepada daerah. Saat ini, kata dia pendapatan yang masuk dari pasar-pasar tersebut baru sebatas pendapatan dari sisi parkir. Itu pun masih kerjasama dengan koperasi pasar. "Ini kita sedang cari tahu. Saat ini memang baru dari parkir saja," katanya.

Sementara, pantauan kemarin, di sejumlah terminal di Denpasar seperti di Terminal Kreneng dan Terminal Wangaya yang dulunya sebagai tempat mangkal para sopir angkot, memang telah berubah menjadi lahan Pasar. Angkot-angkot yang seharusnya berada di terminal tersebut terpaksa mangkal di luar terminal akibat terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang yang berjualan di dalam lokasi terminal. "Karena terminal sudah mati suri, kami terpaksa keliling. Keliling juga belum tentu dapat penumpang," kata salah satu sopir angkot, Made Merta.

Pihaknya mengatakan pendapatan sopir semenjak mati surinya terminal juga semakin merosot. "Sehari paling banyak dapat Rp 70 ribu. Pakai beli bensin Rp 60 ribu. Hidupi anak istri gimana?," kata Merta. Dia sangat menyayangkan pemerintah di Bali dan pemerintah Kota Denpasar yang katanya peduli terhadap rakyat kecil namun kenyataannya justru sebaliknya. Menurut Merta pemerintah juga tidak serius dalam menata dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dan soal transportasi umum. "Buktinya kondisi terminal saja sudah tidak karuan," tandasnya. **nvi**



Giliran Kasi dan Pemilik Lahan Diperiksa

★ Dugaan Korupsi PD Parkir Kota Denpasar

Kajari Denpasar, Erna Noormawati Widodo Putri sudah mengirimkan surat kedua kepada BPKP Wilayah Bali untuk mempertanyakan hasil audit.

DENPASAR, NusaBali

Penyidikan kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar yang sudah menetapkan satu tersangka, yaitu Dirut PD Parkir Nyoman Gede Sudiantara kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan empat orang saksi dari internal PD Parkir. Selain itu, Kejari Denpasar juga sudah melayangkan surat kedua untuk BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali untuk mempertanyakan hasil audit kerugian negara dalam kasus itu.

Pantauan *NusaBali*, pemeriksaan empat orang saksi ini dilakukan di ruang penyidik Pidana Khusus Kejari Denpasar pada, Kamis (10/11) mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.30 Wita. Dari empat orang tersebut, dua di antaranya

merupakan Kepala Seksi (Kasi) di PD Parkir dan dua lainnya merupakan pihak swasta, yaitu pemilik lahan parkir. "Seharusnya ada lima orang yang diperiksa. Tapi satu tidak datang. Untuk namanya juga tidak bisa kami informasikan," ujar Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, IGNA Kusumayasa Diputra didampingi Kasi Pidsus, Syahrul.

Ia mengatakan pemeriksaan saksi-saksi ini merupakan kelanjutan penyidikan sebelumnya. Terkait kerugian negara, Kusumayasa mengatakan pihaknya belum menerima audit dari BPKP Wilayah Bali. Namun Kajari Denpasar, Erna Noormawati Widodo Putri sudah mengirimkan surat kedua kepada BPKP Wilayah Bali untuk mempertanyakan hasil audit tersebut.

"Suratnya sudah dikirim ke BPKP," lanjutnya. Ditambahkannya, pihaknya masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk tersangka Nyoman Gede Sudiantara. Namun jaksa asal Marga, Tabanan ini kembali menolak membeber nama-nama saksi yang akan diperiksa. "Nanti kami informasikan lagi," pungkasnya.

Dalam penyidikan sebelum-

nya disebutkan, Nyoman Gede Sudiantara alias Punglik yang menjabat Dirut PD Parkir diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan uang PD Parkir senilai Rp 6 miliar. Selain itu, politisi PDIP ini juga dituding menyalahi aturan terkait penempatan uang asuransi PD Parkir.

Penempatan uang asuransi Rp 500 juta ini diduga bermasalah karena dikelola oleh Koperasi PD Parkir. Dari perhitungan penyidik, penempatan uang asuransi ini telah dilakukan sejak 9 tahun lalu.

Kalau dihitung per tahunnya ada Rp 500 juta, berarti sampai saat ini ada kerugian negara sekitar Rp 4,5 miliar dalam penempatan asuransi ini. Berdasarkan perhitungan itulah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya mengumumkan Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sudiantara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh PD Parkir. Pengumuman status tersangka Dirut PD Parkir ini disampaikan mantan Kajari Denpasar, Imanuel Zebua usai melakukan serah terima jabatan kepada Kajari Denpasar yang baru, Erna Normawati Widodo Putri di Kejati Bali pada, Senin (20/6) lalu. **rez**

Edisi : Jumat, 11 November 2016

Hal

:

5



Kejari Periksa Senderan Tukad Mati yang Jebol

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan senderan di Tukad Mati, Legian, Badung. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik mendapat informasi jika proyek senilai Rp 2,1 miliar tersebut jebol, padahal baru diserahterimakan dari kontraktor PT Undagi Jaya.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Syahru Wira mengatakan proyek pembangunan tersebut merupakan milik Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung. Dalam proyek ini, dibangun senderan Tukad Mati sepanjang 570 meter. Dalam laporan yang diterima, diduga ada bangunan senderan yang jebol, padahal proyek ini baru saja rampung. Senderan yang jebol tersebut berada beberapa sisi senderan.

Untuk mendapatkan data tersebut, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dinas BMP Badung sebagai pemilik proyek. Selain itu, Syahru mengaku langsung turun ke lokasi proyek untuk melihat langsung senderan yang jebol. "Memang ada beberapa senderan yang retak. Kami masih akan pilah lagi

proyek mana saja yang milik Pemkab Badung. Karena ada juga milik provinsi," jelas Kasi Pidsus yang baru tiga bulan menjabat ini.

Saat ini, penyidik masih mempelajari hasil pemeriksaan. Pihaknya juga masih mencari data dan alat bukti lainnya untuk memperkuat hasil pemeriksaan sebelumnya. Ditegaskannya, pihaknya sangat serius menyelidiki kasus ini. Apalagi selama ini Kabupaten Badung belum pernah tersentuh kasus korupsi. "Kami tidak mau buru-buru dalam kasus ini. Kami akan pelajari data yang ada dan akan mengembangkan kasus ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BMP Kabupaten Badung, IB Surya Suamba yang dikonfirmasi membenarkan adanya retak dalam pembangunan proyek tersebut. Namun ia berdalih jika proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan kontraktor selama lima bulan ke depan. Ia juga menyeret pemerintah pusat dalam kasus ini. "Senderan tersebut tidak hanya milik Badung. Tapi, juga milik pusat. Yang rusak parah itu milik pusat dan sudah kami laporkan untuk diperbaiki," tegasnya. **rez**



Saksi Ahli ITS Mangkir, Diganti BKI

★ Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Ikan di Buleleng

DENPASAR, NusaBali

Setelah gagal mendatangkan saksi ahli dari ITS (Institut Teknologi Surabaya), Prof Dr Ketut Arya, penyidik Kejati Bali akhirnya mendatangkan saksi ahli dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kapal ikan di Buleleng.

Aspidsus Kejati Bali, Polin O Sitanggang mengatakan pihaknya sudah berulang kali memohon kehadiran saksi ahli dari ITS, yaitu Prof Arya. Namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak pernah datang. "Supaya perkara ini tidak tersendat di sini. Kami alihkan pemeriksaan saksi ahli," jelasnya didampingi Kasitut Wayan Suardi pada, Kamis (10/11).

Kali ini yang diperiksa adalah dua saksi ahli dari BKI.

Polin mengatakan dua saksi ahli dari BKI ini sudah datang ke Kejati Bali. Rencananya pada, Jumat saksi ahli ini akan dibawa ke Buleleng untuk melihat langsung kondisi kapal ikan yang diduga menyimpang dari proyek awal. "BKI ini tugasnya memang menyeleksi kelayakan kapal. Makanya besok kami ajak langsung melihat kondisi kapal di Buleleng," tegasnya tanpa mau menyebut nama saksi ahli tersebut.

Ditegaskannya, setelah pemeriksaan saksi ahli ini rampung, pihaknya tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP Wilayah Bali. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun jaksa asal Tapanuli, Sumatera Utara ini enggan membocorkan siapa saja calon tersangka dalam kasus ini. "Ditunggu

saja ya," ujar Polin.

Informasi yang dihimpun, dalam kasus ini penyidik sudah menyiapkan dua calon tersangka. Namun belum diungkap siapa saja dua calon tersangka yang kabarnya sudah beberapa kali diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa beberapa pejabat di Disnakanlut Bali, Disnakanlut Buleleng serta rekanan dari PT F1. Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Bali mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan kapal untuk nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan senilai Rp 10 miliar. Dugaan awal, tujuh kapal yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan nelayan. Bahkan disebut ada kejanggalan dalam komponen dan piranti kapal yang jauh dari kata layak. rez

Edisi : Jumat, 11 November 2016.

Hal : 5



Sejumlah Sekolah Masih Gunakan Lahan Pinjam Pakai

SINGARAJA, NusaBali

Dari ratusan sekolah, tercatat puluhan sekolah SD, SMP, SMA/SMK di Buleleng dinyatakan masih berdiri di atas lahan pribadi. Kondisi tersebut pun dinilai riskan mengundang permasalahan ke depannya jika tidak segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Komisi III DPRD Buleleng, Wayan Masdana, belum lama ini. Seperti misalnya SMKN 1 Busungbiu dan SMPN 2 Kubutambahan. Pendirian sekolah di lahan pribadi ataupun di lahan adat dikhawatirkan akan mengundang polemik pengalihan hak di kemudian hari. Apalagi selama ini sudah ada upaya pengalihan hak atas lahan tersebut di beberapa sekolah di Buleleng. "Masih banyak yang berdiri di lahan pribadi, apalagi saat ini harga lahan cukup tinggi," ujar dia.

Menurutnya permasalahan tanpa ujung akan terjadi ketika

pemilik lahan meminta ganti rugi dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pemerintah yang berujung pada pembengkakan anggaran untuk memenuhi kompensasi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Gede Suyasa dikonfirmasi terpisah Kamis (10/11) kemarin membenarkan hal tersebut. Pihaknya pun setiap tahunnya sudah merancang program pensertifikatan lahan di sekolah-sekolah yang selama ini masih berdiri di lahan hak milik pribadi.

Hanya saja kendala yang dihadapi selama ini masih banyak ahli waris pemilik lahan yang tidak mau menyerahkan asetnya kepada pemerintah. Padahal dulu, lahan tersebut diiklaskan untuk pembangunan sekolah oleh orang tua hal milik yang telah tiada. "Yang memberikan lahan dulu kan leluhurnya, sekarang ahli warisnya yang kadang belum mau menyerahkan," kata Suyasa.

Padahal jika bersedia, semua pembiayaan pensertifikatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan menjalani seluruh proses yang berlaku. Misalnya berdiri di atas lahan adat, harus ada paruman dan perarem yang menyatakan pelimpahan kepemilikan. Sementara jika milik pribadi, harus ada pernyataan hibah.

Terkait permintaan kompensasi dari ahli waris lahan, pihaknya pun tidak menampik hal tersebut. Bahkan jika memang terjadi lagi, kewenangannya ada di tim kabupaten yang akan melakukan pembahasan. Termasuk menelisik apakah lahan tersebut memang lahan miliknya, atau tidak. Karena Suyasa mengatakan penuntutan kompensasi pernah terjadi di suatu wilayah, namun setelah ditelaah, lahan yang dituntut tidak sesuai dengan gambar yang ada di sertifikat. **k23**



• NUSABALI/LILI

SEKOLAH di Buleleng masih banyak berdiri di lahan pribadi dan rentan terjadi pelimpahan hak milik.

Edisi : Jumat, 11 November 2016

Hal : 2